

SKRIPSI
MENDOBRAK DOMINASI PEREMPUAN DI DESA DOKA KAKA,
KECAMATAN LOLI, KABUPATEN SUMBA BARAT,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Disusun Oleh :
ARTISTA YURISNA MALE
19520051

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2023

**MENDOBRAK DOMINASI PEREMPUAN DI DESA
DOKA KAKA, KECAMATAN LOLI, KABUPATEN
SUMBA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**






**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DESA "APMD" YOGYAKARTA
2023**



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Artista Yurisna Male
Tanggal : 17 Mei 2023
Jam : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI	
Nama	Tanda Tangan
<u>Ir. Nelly Tiurmida, MPA</u> Ketua Penguji / Pembimbing	
<u>Utami Sulistiana, S.P. M.P</u> Penguji Samping I	
<u>Dr. Riief Samaloisa</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Riief Samaloisa

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Artista Yurisna Male

Nim : 19520051

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan skripsi yang berjudul “**Mendobrak Dominasi Perempuan di Desa Doka Kaka, Kecamatan Loli, kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur**”, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 17 Mei 2023

Penulis



Artista Yurisna Male

19520051

MOTTO

“Janji Allah tak pernah mengecewakan,
dan bila kamu masih merasa kecewa mungkin ada yang salah dengan iman mu”

(Rufina)

“Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan
buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya;
apa saja yang diperbuatnya berhasil”

(Mazmur 1 : 3)

“Jangan minta kepada Tuhan apa yang menurut mu baik
tetapi mintalah kepada-Nya apa yang menurut Dia baik bagi kamu”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karuniaNya. Akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan target. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan saya.

1. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Yehezkiel Male dan Ibu Kristina Yuliana Bolo (Alm) yang selalu memberikan dukungan.
2. Untuk orang tua wali saya, Bapak Hendrik Tena Bolo, Ibu Rahel Taba Leko (Alm), Bapak Yohanes Fernandes Bolo, Ibu Roshinta Thalo, yang selalu menjadi sumber kekuatan saya, yang selalu memberikan cinta, kasih dan motivasi serta selalu mendukung keputusan-keputusan yang saya ambil. Terimakasih untuk doa-doa luar biasa dan kerja keras kalian untuk menyekolahkan saya, tanpa kalian saya mungkin tidak akan ada di tahap ini.
3. Untuk saudara saya, Rehuel Reinard Bolo dan Resman Jehand Bolo terimakasih telah menjadi penyemangat dikala lelah melanda dan terimakasih atas perhatian selama ini
4. Untuk seluruh keluarga besar 'Hendra Bolo' bapak, mama, om, tante, kakak, adik, serta persepupuan, terimakasih telah memberikan *support* kepada saya
5. Untuk Dosen Pembimbing saya, Ibu Ir. Nelly Tiurmida, M.P.A yang selalu sabar dalam membimbing dan mengajak bimbingan dari awal hingga akhir serta ilmu-ilmu yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Untuk Dosen Penguji saya, Ibu Utami Sulistiana, S.P, M.P dan Bapak Dr. Rijel Samaloisa yang telah menguji skripsi saya sehingga dapat dibenahi menjadi tulisan yang lebih baik lagi.

7. Kepada teman-teman dari kampung halaman saya (Iren Saingo dan Mally Awang, serta teman-teman lainnya) yang selalu menanyakan kabar dan memberikan semangat kepada saya serta selalu memberikan bantuan kalah susah maupun senang, semoga pertemanan ini selamanya.
8. Kepada teman-teman saya (Iken Mude, Geni Ayu, Elen Wayan, Astin Bunga, Sonya Kinker, beserta teman-teman lainnya) yang telah menemani saya selama perkuliahan ini, yang saling membantu dan saling memberikan semangat dalam keadaan suka maupun duka, semoga Tuhan Yesus membalas segala kebaikan kalian, dan menjadi orang sukses nantinya serta pertemanan kita selamanya.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran selama perkuliahan, terimakasih untuk anak-anak Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 terimakasih telah menjadi orang-orang dan keluarga baru, tim yang kompak dan saling memberikan saran dan kritik serta bantuan satu dan yang lainnya.
10. Terimakasih kepada Rumah Kost Putri Flamboyan sebagai tempat naungan dan keluarga disatu atap yang sama, terimakasih untuk bantuan teman-teman kost.
11. Terimakasih kepada almamater STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar dan berkembang dikampus ini sehingga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat dan berguna bagi banyak orang.
12. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasihNya penulis dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang mahasiswa dalam melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Mendobrak Dominasi Perempuan di Desa Doka Kaka, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

Penulis benar menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan dan dipelajari lebih mendalam, usaha tersebut sudah dilakukan penulis namun karena keterbatasan kemampuan penulis menyebabkan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di kemudian hari. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Kelancaran penyusunan skripsi ini berkat bimbingan, arahan dan petunjuk serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang memberikan karunia, kekuatan dan berkat sehingga sampai pada tahap ini.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Ir. Nelly Tiurmida M.P.A selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi.

5. Pemerintah Desa Doka Kaka, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Doka Kaka.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang selama ini meluangkan waktu dalam membimbing dan memberikan pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
8. Seluruh staf dan karyawan-karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Yogyakarta, 17 Mei 2023

Penulis



Artista Yurisna Male

INTISARI

Keterwakilan perempuan dalam ranah politik menjadi masalah yang hangat perbincangan saat ini karena masih sangat rendah keterwakilannya bila dilihat dari kualitas dan kuantitas. Penyebab terjadinya ialah perempuan mengalami kesenjangan sosial di mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial budaya hingga lingkungan yang lebih luas. Telah banyak aturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi hal tersebut namun tidak ada perubahan drastis yang mampu mengubah kondisi tersebut. Keunikan yang ditemukan yakni dengan kondisi sosial seperti ini peneliti akan melihat faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan dalam ranah politik di Desa Doka Kaka, Sumba Barat. Dengan mengkaji lebih dalam kesadaran dari diri kaum perempuan itu sendiri dalam mendobrak kesenjangan yang ada. Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana perempuan mendobrak dominasi dalam berpolitik di Desa Doka Kaka, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat ?, 2) Bagaimana kesadaran perempuan dalam berpolitik di Desa Doka Kaka, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat ? . Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui faktor penghambat perempuan dalam mendobrak dominasi berpolitik di Desa Doka Kaka, Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat , 2) Untuk mengetahui seberapa besar perempuan sadar akan politik dalam mendobrak dominasi di Desa Doka Kaka , 3) Untuk mengetahui peran pemerintah dalam ikut serta membantu mewujudkan kesetaraan gender dalam ranah masyarakat dan ranah politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi. Penentuan informan dipilih secara *snowball*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Prosedur analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal dalam kehidupan perempuan di Sumba berpengaruh terhadap kesadaran perempuan dalam berpolitik. Kesadaran perempuan dalam mendobrak dominasi sangat penting dilakukan dimulai dari dalam diri sendiri sedini mungkin dan dari pola pikir masyarakat lingkungan sekitar juga mempengaruhi kaum perempuan. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan wadah pendidikan politik yang bersifat formal harus dilakukan di Desa Doka Kaka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kaum perempuan.

Kata kunci : Mendobrak dominasi, perempuan, gender, politik

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	11
C. TUJUAN PENELITIAN.....	11
D. MANFAAT PENELITIAN	11
E. <i>LITERATUR REVIEW</i>	12
F. KERANGKA KONSEP.....	17
G. METODOLOGI PENELITIAN.....	24
BAB II PROFIL DESA DOKAK KAKA KECAMATAN LOLI KABUPATEN SUMBA BARAT.....	32
A. Kondisi Desa.....	32
1. Sejarah Desa Doka Kaka	32
2. Keadaan Geografis Desa Doka Kaka.....	33
3. Kondisi Demografis Desa Doka Kaka.....	34
4. Keadaan Ekonomi	34
5. Aspek Pendidikan	36
6. Kondisi Sosial Budaya.....	37
B. Pemerintah Desa	39
BAB III ANALISIS MENDOBRAK DOMINASI PEREMPUAN	43
A. POLITIK DI DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021	43

1. Pemilihan Kepala Desa Doka Kaka Tahun 2021	43
2. Unsur-unsur Penting Dalam Ranah Politik Desa.....	44
3. Strategi-strategi Yang Digunakan Dalam Pilkades.....	46
B. PERAN PEMERINTAH DALAM TINGKATKAN KAPASITAS PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITK.....	49
C. KESADARAN PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK DI DESA DOKA KAKA...57	
1. Penyebab Minimnya Partisipasi Politik Perempuan	57
2. Kesadaran Berpolitik	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR PERTANYAAN	71
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Deskripsi Informan.....	26
Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaannya.....	33
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk.....	34
Tabel 2.3 Mata Pencaharian Pokok Penduduk.....	34
Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan.....	36
Tabel 2.5 Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa.....	40

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Pemerintah Desa.....	39
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keterwakilan perempuan dalam ranah politik sudah hadir sejak abad ke-18 di negara-negara demokrasi seperti Amerika, Eropa dan Asia Tenggara. Tetapi partisipasi perempuan dalam ranah politik masih terbilang sangat rendah di Indonesia. Data yang diperoleh dari *World Bank* (2019) menunjukkan bahwa se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di politik, negara Indonesia menempati peringkat ke-7. Pada 30 tahun yang lalu, partisipasi perempuan dalam ranah politik masih menjadi isu pinggiran yang hanya dibahas oleh organisasi diluar pemerintahan khusus perempuan dalam gerakan sipil masyarakat Asia Tenggara. Hal yang selalu menjadi bahan perbincangan adalah mengapa partisipasi perempuan masih rendah, baik secara kualitas dan kuantitas (jumlah perempuan) masih dihadapi perempuan hingga saat ini. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 tentang keterwakilan perempuan di politik menyatakan bahwa semua orang (laki-laki dan perempuan) berhak berpartisipasi dalam pemerintahan di negaranya, mengakses layanan publik di negaranya dan menggunakan hak dipilih/memilih dalam pemilu yang universal dan setara untuk semua orang (Pasal 21). Dan juga ada Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa dalam status perempuan (*The Commission On the Status of Women/CSW*) menyusun draf terkait dengan hak-hak perempuan yakni instrumen legal internasional pertama untuk melindungi dan mengakui hak-hak politik perempuan yang terdapat dalam konvensi hak-hak politik perempuan (*Convention On the Political Rights of Women*) pada tahun 1953. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi diberbagai sektor

seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, serta diikuti dengan tuntutan dalam bidang intelektual sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dengan adanya perubahan kemajuan ini tak luput pula ada aksi dan tuntutan dari kaum perempuan. Perempuan selalu dianggap berada di *second class*, tidak berdaya dan tertindas. Oleh karena itu, mereka berasumsi diperlukan perjuangan untuk menuju emansipatif, agar perempuan mampu memperjuangkan kepentingan dirinya, tidak bergantung pada orang lain. (Hulwati, 2008). Isu-isu tentang perempuan banyak mengisi perbincangan di dalam kehidupan masyarakat. Isu perempuan menjadi menarik saat kesadaran dan ketidakadilan diantara dua jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) yang disebut ketidakadilan gender semakin tinggi di kalangan masyarakat.

Kesadaran politik perempuan di Indonesia sejak Kongres Perempuan pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1928. Dalam bentuk partisipasi yang nyata terhadap kesadaran politik dan penggunaan hak politik perempuan terlihat dalam Pemilu tahun 1995, di mana mereka mempunyai hak memilih dan dipilih. Hak antara laki-laki dengan hak perempuan punya pengakuan yang sama dalam kehidupan berbangsa di Indonesia dan diakui secara tegas. Pengakuan tersebut telah dibuat landasan hukum dan perjanjian berbagai konvensi yang menjamin hak berpolitik mereka (Mukarom, 2008). Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk terus menerus mengembangkannya melalui konsesus-konsesus nasional (Sudharmono, 1995).

Jika dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tidak adanya hal-hal yang bersifat diskriminatif gender. Undang-Undang Dasar 1955 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia (RI) mengakui bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kesamaan dan kesetaraan dalam hal kedudukan, hak dan kewajiban. Hal ini tegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 yang menyatakan

bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini mengandung arti bahwa semua warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan semua berhak diperlakukan secara adil, tanpa adanya diskriminasi. Pada ayat 3 diamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan”. Secara jelas ayat ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan warga negara Indonesia memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk terlibat dalam politik sesuai dengan persyaratan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 sudah menganut prinsip non diskriminatif. Dengan adanya prinsip ini maka baik perempuan maupun laki-laki sebagai warga negara mempunyai peluang yang sama untuk terlibat dalam pemerintahan. Semua warga negara apapun gendernya, berhak diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan (Damaryanti, 2015). UUD 1945 tidak memuat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, dapat pula dilihat dalam Konstitusi (UUD 1945) pasal 27, menyatakan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang setara/ sama di depan hukum. Karena itu laki-laki dan perempuan memiliki persamaan atas hak hukum dalam semua bidang kehidupan, termasuk persamaan dalam bidang organisasi masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengangkat posisi dan derajat perempuan agar setara dengan laki-laki melalui berbagai institusi baik formal maupun non formal. Adanya ketimpangan akses terhadap politik antara perempuan dibandingkan laki-laki selama ini, mendorong berbagai organisasi dan elemen perjuangan pro perempuan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik (Subono, 2019). Upaya-upaya tersebut kemudian berhasil mempengaruhi pemerintah sehingga secara khusus untuk mewujudkan kesetaraan gender maka perempuan diberi ruang dengan

menerbitkan kebijakan *affirmative action* melalui pembagian kuota 30% kursi di parlemen yang mewajibkan hal tersebut dimuat dalam UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Namun partisipasi perempuan dalam ranah politik masih rendah yakni dibawah 30% dari ketetapan kebijakan tentang kuota yang diberikan kepada perempuan. Kalau pun ada perempuan yang berhasil masuk politik dan menduduki jabatan cukup tinggi dibanding laki-laki di suatu daerah maka itu sebagian besar karena latar belakang yang dimiliki seperti keluarga yang berpengaruh, suami yang memiliki jabatan atau diusung partai sebagai formalitas untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Cukup jarang dari mereka yang membawa namanya sendiri atau mewakili kepentingan perempuan secara umum. Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif sangatlah rendah, jika dilihat dari populasi, wanita cenderung lebih banyak dari pada penduduk laki-laki, rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh psikologis, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, juga yang terpilih ini tidak memiliki kompeten untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kebijakan (Oktaviani Adhi Suciptaningsih, 2011).

Di Indonesia perempuan sering kali dibiarkan tidak terlibat dalam ranah politik sehingga tak heran bila pengalaman berpolitik laki-laki setingkat atau bahkan jauh lebih tinggi di atas perempuan. Kurangnya kesempatan yang dimiliki perempuan untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan atau bahkan menjadi pemimpin dalam suatu instansi/organisasi misalnya membuat perempuan memilih bersikap pasif. Berangkat dari pernyataan yang menyatakan bahwa “untuk apa seorang perempuan sekolah tinggi atau belajar politik, kalau ujung-ujungnya juga bakal menjadi seorang ibu rumah tangga yang kerjanya di dapur dan mengurus rumah tangga”. Perempuan yang diberi stigma seperti itu oleh masyarakat atau kebanyakan kaum patriarki khususnya, mulai cukup resah dan ingin mematahkan stigma tersebut dengan cara menunjukkan dirinya dalam

dunia politik. Dalam dunia politik yang masih sangat kental dengan budaya patriarkhinya menjadi wadah bagi perempuan untuk berani tampil. Tidak adanya kesetaraan yang dibentuk dalam jangka waktu yang lama menjadikan hal tersebut sebagai fakta sejarah bahwa posisi perempuan ditempatkan tertinggal dibelakang laki-laki sehingga mereka tidak memiliki pengalaman berkontes di dunia politik. Dari praktik budaya politik seperti inilah yang menyebabkan kaum perempuan untuk mendapatkan ruang politik yang sama dengan laki-laki cukup sulit. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam ranah politik menjadi perbincangan dunia dalam beberapa dekade terakhir ini. Hal tersebut yang kemudian mengarah pada isu kesetaraan gender dan kebijakan yang dibuat mengenai kesetaraan gender. Dengan adanya kebijakan tersebut banyak yang beranggapan bahwa itu merupakan diskriminasi terhadap kaum patriarki tetapi yang sebenarnya bila dilihat lebih jauh bukan menciptakan kompetisi antara laki-laki dan perempuan tetapi agar terciptanya *balance* atau saling melengkapi fungsi dari keduanya.

Ketimpangan politik dalam hal gender juga terjadi di tingkat desa. Menjadi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi Indonesia menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan kepala negara, badan legislatif, kepala daerah atau bahkan pada tingkat yang lebih rendah Pemilihan kepala desa (Pilkades). Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 33 yang mengatur tentang syarat pencalonan kepala desa yang tidak harus berjenis kelamin tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala desa dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dalam pesta demokrasi tingkat desa ini Pilkades memiliki aturan bahwa calon kepala desa tidak menggunakan basis partai atau tidak diusung oleh partai politik. Oleh sebab itu, bentuk asli dari demokrasi bisa dilihat dari Pilkades karena merupakan

suatu wadah sebagai penyalur kehendak rakyat yang berada di tingkat desa. Desa yang berada di tingkat paling rendah menjadi sebuah pondasi untuk mendobrak kemajuan suatu negara. Sehingga dalam memilih calon pemimpin di tingkat desa perlu ketelitian dan kecermatan dari masyarakat dalam menentukan pilihannya. Pilkades cukup berbeda dari pemilihan kepala negara atau pemilihan kepala daerah karena calon kades adalah orang-orang yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat dan juga pesta demokrasi yang dilaksanakan lebih terasa panas dibanding pemilihan yang lain. Namun karena kurangnya pendidikan politik masyarakat desa, pesta demokrasi yang dilaksanakan pada tingkat desa seringkali visi dan misi tidak menjadi tolak ukur pemilihan untuk memilih, hal ini digantikan dengan kedekatan antara calon kades dengan masyarakat. Hal ini yang menyebabkan cukup sulit tentunya bagi kaum perempuan untuk masuk dalam ranah politik tingkat desa karena kurangnya pemahaman politik bagi perempuan.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang dari segi pembangunan, pendidikan dan kesehatan cukup tertinggal dari provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Suatu wilayah dengan budaya patriarkhi yang masih sangat kental. Dengan kondisi seperti ini, banyak anak muda yang memutuskan berhenti sekolah untuk mencari pekerjaan dan bagi sebagian kaum perempuan akan menikah muda. Pola pikir orang tua masyarakat banyak yang beranggapan bahwa mereka merasa rugi untuk membiayai sekolah anak perempuan karena dianggap yang perlu dan harus sekolah tinggi adalah kaum laki-laki yang suatu saat akan menjadi tulang punggung keluarga. Dalam adat budaya masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur, khususnya di kecamatan Loli, walau di tengah gempuran globalisasi dan modernisasi memasuki kehidupan masyarakat Sumba, namun banyak juga yang masih tetap mempertahankan tradisi leluhur. Tak hanya kampun-kampun kecil, bahkan kampung besar dengan

jumlah penduduk banyak juga tetap mempertahankan budaya adatnya. Kampung-kampung adat di Sumba sangat unik dengan tradisi dan adat istiadatnya yang masih dilakukan dan dijalankan secara turun temurun sampai saat ini. Bagi masyarakat Sumba, perempuan dilambangkan sebagai ibu yang melahirkan dan meneruskan keturunan. Perempuan sangat diagungkan dan dihormati, dapat dilihat dari jumlah belis (mahar) dalam pesta perkawinan yang cukup banyak melalui beberapa tahapan agar perempuan bisa memasuki rumah adat. Namun, dengan mahar yang mahal tersebut posisi perempuan tidak serta-merta ketika memasuki rumah adat mendapat tempat yang sesuai dengan harga mahar karena ada beberapa proses untuk masuk ke dalam rumah dan nyatanya menantu perempuan atau istri harus mematuhi larangan-larangan yang berlaku, seperti hal yang paling umum terjadi yakni tidak diperbolehkan menyentuh, menginjak dan melewati beberapa batasan atau area bagian rumah. Sebaliknya hal ini tidak berlaku bagi menantu laki-laki ketika berkunjung ke rumah sang istri tidak ada larangan yang berlaku sama. Pintu antara pria dan wanita selalu diletakkan berseberangan, hirarki dan penataan ruangan dalam rumah adat Sumba sangat jelas dengan pola yang memisahkan area perempuan dan laki-laki. Tak hanya itu, masalah bagi kaum perempuan yang cukup menjadi isu hangat saat ini di NTT adalah budaya “kawin paksa” yang saat ini banyak disalah artikan sebagai budaya yang harus dilestarikan namun pada kenyataannya hal tersebut bukan merupakan budaya yang asli karena salah penafsiran dari masyarakat, sehingga masuk pada tindakan kekerasan dan pelecehan pada kaum perempuan karena perempuan akan diculik, diarak-arak sepanjang jalan dan kemudian di paksa kawin oleh pihak laki-laki. Dari hal tersebut kemudian pemerintah membuat suatu aturan yang terdapat dalam KUHP pasal 332 ayat 2 yang menyatakan bahwa untuk pelanggar dan pelaku kawin tangkap akan diberi

hukuman pidana. Namun pada kenyataannya aturan tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat dan budaya yang salah itu tetap berlanjut hingga sekarang.

Dalam tingkatan desa wadah sebagai media yang menaungi perempuan adalah organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi kemasyarakatan atau gerakan nasional yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Gerakan ini tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat bertujuan meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Namun pada kenyataan yang terjadi organisasi PKK ini kebanyakan tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana harusnya berjalan. Karena PKK hanya sebatas wadah pertemuan ibu-ibu membahas hal seperti arisan.

Dengan masalah-masalah inilah perlu adanya kaum perempuan yang mau dan mampu untuk merubah keadaan yang menjadi penindasan bagi perempuan. Melalui ranah politik dan menduduki posisi cukup tinggi menjadi salah satu alternatif untuk mengubah keadaan saat ini karena yang paling mengerti dengan perempuan adalah perempuan itu sendiri. Hal ini dapat dimulai dari tingkat paling rendah dalam ranah politik menjadi atau terlibat dalam pemilihan kepala desa misalnya, kemudian dapat menggerakkan dan mengajak semua perempuan untuk terlibat dalam peningkatan kapasitas serta memperoleh hak-hak yang seharusnya dimiliki.

Pada pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember Tahun 2021 di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi perempuan sangat rendah. Jumlah desa yang ikut melaksanakan pesta demokrasi tersebut sebanyak 16 desa yang tersebar di 5 kecamatan

yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Data yang diperoleh dari Ditjen Bina Pemdes-Kementerian Dalam Negeri, pilkades tersebut diikuti oleh 57 calon kepala desa, yang terdiri dari 55 calon laki-laki dan 2 calon perempuan yang turut andil ikut memperebutkan kursi sebagai calon kepala desa. Salah satu dari desa yang memiliki calon kades perempuan adalah Desa Doka Kaka. Dari 4 bakal calon ada 3 calon kades laki-laki dan ada 1 calon kades perempuan. Balik lagi, bahwa dengan sumber daya manusia (SDM) masyarakat yang kurang, visi dan misi bukan menjadi alasan untuk memilih. Setelah perhelatan pesta demokrasi yang cukup panjang kades periode sebelumnya kembali terpilih menjadi kades, sedangkan calon kades yang perempuan menduduki posisi kedua perolehan suara. Ini merupakan pencapaian yang cukup besar bagi perempuan dalam pesta demokrasi Pilkades di Desa Doka Kaka sepanjang berdirinya desa tersebut. Tetapi, yang menjadi persoalan adanya isu bahwa calon kades perempuan tersebut tidak sepenuhnya membawa kepentingan perempuan didalamnya atau berdiri di kakinya sendiri. Dari hal ini dapat dilihat bahwa dengan cita-cita yang dimiliki perempuan yang tertidas untuk bangkit diperlukan adanya kesadaran perempuan dalam berpolitik, tidak serta merta harus bergantung pada orang lain untuk bisa menunjukkan dirinya pada dunia atau dimulai dari tingkat terkecil dari suatu negara seperti desa.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang perempuan mendobrak dominasi laki-laki melalui peningkatan kapasitas dan kesadaran berpolitik, dilihat dari Desa Doka Kaka, Kabupaten Sumba Barat, NTT. Ketimpangan yang terjadi terhadap kaum perempuan ada bahkan dari lingkungan paling kecil yakni keluarga dan budaya juga termasuk membuat sekat pemisah antara perempuan dan laki-laki. Oleh sebab itu, melahirkan perempuan yang mampu melakukan perlawanan atas posisi hierarki bukan hal yang mudah. Karena kenyataannya dalam proses modernisasi, peran-peran politik

perempuan bersamaan dengan lahirnya kekuasaan reproduksi wacana dari perempuan yang ternyata dijinakkan oleh kekuasaan kaum laki-laki. Perempuan akan memiliki ruang publik, apabila mampu menunjukkan sikap kritis dan resistensinya atas laki-laki. Sikap kritis dari perempuan inilah yang kemudian diharapkan mampu membangun imajinasi perlawanan untuk menegakkan proses politik. Dari persoalan-persoalan perempuan dengan segala bentuk penindasan dan diskriminasi yang dihadapi memunculkan rasa kurang percaya diri bagi perempuan. Terlepas dari hambatan-hambatan eksternal, harus dilihat lebih rinci secara mendetail tentang diri internal kaum perempuan. Karena berbagai hal yang dilakukan akan sia-sia bila tidak adanya kesadaran dari perempuan itu sendiri. Maka dengan melihat serta meningkatkan kapasitas yang dimiliki perempuan dengan kesadaran berpolitik, kaum patriarkhi dapat diseimbangkan dan perempuan duduk di posisi manapun bukan untuk memenuhi kuota tetapi punya harga diri dan tegak berdiri di kakinya sendiri. Tak hanya itu, perempuan tentunya harus pro terhadap masalah yang di hadapi perempuan, bukan hanya membawa namanya sendiri tetapi membawa suara untuk mendapatkan hak-hak perempuan secara umum dimulai dari dirinya sendiri. Selain perlunya pemahaman politik bagi kaum perempuan, masyarakat juga perlu diberikan pendidikan politik untuk memahami politik agar dalam pengambilan keputusan dapat menentukan pilihannya yang dapat membangun desanya menjadi lebih baik dengan pilihan yang terbaik.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah terdapat dua pertanyaan, sebagai berikut :

1. Bagaimana perempuan mendobrak dominasi dalam berpolitik di Desa Doka Kaka, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat ?
2. Bagaimana kesadaran perempuan dalam berpolitik di Desa Doka Kaka, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penghambat perempuan dalam mendobrak dominasi berpolitik di Desa Doka Kaka, Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat
2. Untuk mengetahui seberapa besar perempuan sadar akan politik dalam mendobrak dominasi di Desa Doka Kaka
3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam ikut serta membantu mewujudkan kesetaraan gender dalam ranah masyarakat dan ranah politik

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi yang berkaitan dengan kesadaran berpolitik perempuan melalui dobrakan dominasi perempuan.
 - b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran perempuan dalam berpolitik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kaum Perempuan

Secara praktis tujuan dari penelitian ini yakni agar kaum perempuan lebih sadar akan hak-haknya dan pentingnya politik di era sekarang ini untuk menciptakan kesetaraan gender di ranah politik.

b. Bagi Pemerintah Desa

Secara praktis penelitian ini bertujuan agar pemerintah desa memberikan pengetahuan berpolitik yang lebih baik kepada masyarakat terkhususnya kaum perempuan.

E. LITERATUR REVIEW

Sebagai bahan acuan untuk penelitian ini, maka penulis melampirkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Adapun literatur jurnal sebagai berikut :

Jurnal dengan judul “Analisis wacana : Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia tahun 2018-2019”, yang ditulis oleh Herdin Arie Saputra, Dyah Mutiarin dan Achmad Nurmandi. Dalam jurnal ini membahas tentang peran perempuan dalam dunia politik yang masih sangat rendah. Adanya beberapa hambatan yang menjadi penyebab dari permasalahan tersebut. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya beberapa hambatan yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi seperti hambatan budaya patriarki, modal yang harus dimiliki, parpol yang kurang memberikan ruang dan keturunan tokoh politik yang sudah memiliki basis massa sehingga dengan mudah bisa masuk.

Jurnal dengan judul “Kesadaran hukum pada perempuan dalam pemilihan kepala desa di Indragiri Hilir, yang ditulis oleh Fitri Wahyuni dan Inggrit Fernandes.

Jurnal ini membahas tentang melihat partisipasi perempuan pada Pilkades di Indragiri Hilir, baik sebagai pemilih maupun sebagai yang dipilih (pencalonan). Hasil penelitian, ditemukan bahwa kesadaran hukum masyarakat pada pilkades sudah cukup baik namun kesadaran perempuan untuk ikut terlibat mencalonkan diri sebagai kades masih sangat rendah karena faktor budaya yang ada di masyarakat.

Jurnal dengan judul “Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia”, yang ditulis oleh Anifatul Kiftiyah. Dalam jurnal ini membahas tentang partisipasi perempuan di politik dan dikaitkan dengan pandangan agama Islam terkait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah politik. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor yang menjadi penyebab perempuan kurang dalam konteks politik bukan karena agama ataupun budaya tetapi karena kaum laki-laki yang menggunakan dua hal tersebut yakni agama dan budaya untuk mendiskriminasi kaum perempuan.

Jurnal dengan judul “Urgensi Pendidikan politik bagi Perempuan”, yang dibuat oleh Achmad Soeharto. Jurnal ini membahas tentang Indonesia merupakan negara demokratis, tetapi masih jauh dari demokratis yang sesungguhnya. Perempuan sebagai agen pendukung yang sangat potensial sebenarnya harus diajarkan tentang politik. Pendidikan politik bagi perempuan bertujuan untuk membebaskan perempuan dari ketidaksetaraan bukan pada kekuasaan atau dominasi. Perempuan sesungguhnya harus memiliki dua peran yakni peran politik untuk kepentingan masyarakat banyak dan peran ibu. kewajibannya sebagai istri mendampingi suaminya dan mendidik anak-anaknya. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendidikan politik ini yakni pembinaan, pelatihan dan pembedayaan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi jasmani dan rohani karena bagaimanapun terdapat perbedaan didalamnya. Pengaruh Pendidikan politik perempuan tidak hanya berkutat di lingkup

legislatif maupun eksekutif tetapi juga di lingkup yang lebih luas seperti sosial dan pembangunan demokrasi menuju kecerdasan dalam berpolitik.

Jurnal dengan judul “Tantangan dan Peluang Perempuan dalam berpolitik di Indonesia (masyarakat patriarkhi)” ditulis oleh Herinto Sidik Iriansyah. Dalam jurnal ini membahas tentang budaya patriarkhi di Indonesia melihat pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang dimana peran perempuan dinilai cenderung bias kearah dibatasi hanya pada urusan rumah tangga saja. Padahal secara yuridis tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Namun karena adanya kendala yakni faktor internal dan eksternal perempuan sehingga pertumbuhan partisipasi mereka jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Dengan melihat tantangan-tantangan yang ada seperti aspek sosiologi, budaya dan perspektif gender maka dapat dijadikan dasar atau strategi untuk membuat program guna menumbuhkan kesadaran berpolitik dan pengetahuan perempuan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perempuan harus terus menerus mempersiapkan dirinya untuk meningkatkan kualitas individu dalam ilmu pengetahuan, kemampuan memimpin dan berorganisasi untuk memberikan keyakinan bahwa mereka memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk berpartisipasi dalam politik. Peningkatan kapasitas perempuan dapat ditingkatkan melalui peluang yang ada baik itu yang diatur dalam undang-undang maupun lembaga-lembaga internasional yang membahas tentang masalah perempuan.

Jurnal dengan judul “Perempuan dalam kukungan budaya politik patriarkhi”, yang ditulis oleh Nurbaity Prastyanda Yuwono. Jurnal ini membahas tentang budaya patriarkhi yang menjadi hambatan dalam peningkatan partisipasi politik perempuan. Hasil rekonstruksi budaya patriarkhi seperti menganggap politik hanya berada pada ranah maskulin, perempuan memiliki akal yang lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk memimpin sehingga tidak cocok masuk dalam ranah politik. Hasil dari penelitian

menjelaskan bahwa upaya yang harus dilakukan perempuan yakni menyadarkan perempuan tentang politik melalui pendidikan politik berwawasan gender, membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan atau organisasi perempuan, rekonstruksi budaya dan reinterpretasi pemahaman agama yang bias gender dan merubah struktur organisasi partai politik dan mengefektifkan implementasi peraturan perundang-undangan.

Jurnal dengan judul “Analisis pengaruh faktor pendidikan terhadap partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala desa (Pilwu) tahun 2017 di Kecamatan Widasari”, yang ditulis oleh Nunung Nurjanah dan Syukron Ma'mun. Jurnal ini membahas tentang rendahnya partisipasi politik perempuan dalam berbagai agenda pemilihan baik tingkat nasional, daerah maupun lokal. Dan melihat tentang pengaruh faktor Pendidikan terhadap partisipasi politik perempuan pada pilkades di Kecamatan Widasari. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa pendidikan tidak menjadi faktor penentu yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pilkades tersebut. Namun ada dua faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam kontes politik tingkat lokal yakni dorongan suami dan keterlibatan diri dalam suatu organisasi.

Jurnal dengan judul “Politisi perempuan dan korupsi : Mencari solusi atas dilema politik kesetaraan gender di era reformasi” yang ditulis oleh Juwita Hayyuning Prastiwi dan Wimmy Haliim. Dalam jurnal ini membahas tentang keterlibatan perempuan dalam politik diyakini sebagai salah satu strategi yang ampuh untuk mencegah terjadinya korupsi. Karena diyakini bahwa perempuan cenderung tidak toleran terhadap perilaku korupsi dibandingkan dengan laki-laki. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa keterlibatan politisi perempuan dalam pemberantasan korupsi nyatanya tidak efektif di Indonesia, karena persoalan politisi perempuan dan korupsi

berkelindan dengan kultur oligarki yang sarat akan budaya patronase, sehingga perempuan yang memenangkan kursi tidak jauh dari lingkaran dinasti politik.

Jurnal dengan judul “Kandidat perempuan dan tantangan politik patronase pada pemilu legislatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur” yang ditulis oleh Benediktus Dalupe. Jurnal ini membahas tentang upaya calon legislatif perempuan di Nusa Tenggara Timur pada pemilihan umum tahun 2019 ditengah maraknya politik patronase. Patronase sendiri dapat diartikan sebagai pemberian uang tunai, barang atau jasa kepada si pemilih beberapa hari menjelang pemilu kemudian dengan harapan penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi (kandidat) saat pemilu berlangsung atau lebih singkatnya dapat disebut politik uang. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa usaha untuk meningkatkan representasi perempuan di lembaga legislatif masih sangat rendah karena tantangan yakni faktor dari budaya patronase. Kebijakan afirmasi saja belum cukup untuk meningkatkan keterpilihan perempuan. Sejumlah perempuan dapat memiliki latar belakang politik, pengalaman dan nomor urut yang dapat menungjang pencalonan tetapi praktik patronase dan kekuatan uang dapat mengubah permainan.

Jurnal dengan judul “Dinamika kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia” yang ditulis oleh Wery Gusmansyah. Dalam jurnal ini membahas tentang terminologi publik yang erat kaitannya dengan peran gender, konsep gender dan *stereotype*, telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki. Akibat dari situasi politik yang seperti itu yakni marjinalisasi dan pengucilan perempuan dari ranah kehidupan politik formal. Dari hal inilah diperlukan upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam dunia politik, sehingga mampu mengubah cara pandang masyarakat tentang budaya patriarkhi. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa diperlukan usaha untuk meningkatkan pengetahuan tentang berpolitik

perempuan melalui pendidikan politik karena dengan adanya peningkatan taraf pendidikan bagi perempuan maka daya saing dan kompetisi kaum perempuan dalam bidang politik. Dan juga pendidikan politik bagi masyarakat luas agar dapat memandang politik lebih luas lagi oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan lainnya. Dengan ini, kemungkinan terpilih antara perempuan dan laki-laki sama. Sehingga kesetaraan gender dalam ranah politik semakin baik dan efek sampingnya yakni memajukan usaha pemberantasan korupsi.

Dari hasil review literatur yang telah dilakukan, peneliti memberi kesimpulan bahwa peneliti setuju dan tidak setuju dengan beberapa hal sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan yang ditemui penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti dapat menemukan kesenjangan yang belum dibahas yakni selama ini kita hanya melihat dari satu sisi bahwa kaum laki-laki yang terkesan melakukan diskriminasi, padahal kaum perempuan sudah banyak diberikan kesempatan tetapi karena takut mencoba dan tidak memiliki kesadaran maka kesempatan itu terbuang sia-sia dan kaum perempuan tidak mampu keluar dari zona ketidaknyamanan tersebut, terkhusus dalam hal berpolitik.

F. KERANGKA KONSEP

1. Feminisme

Feminisme adalah gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki yang merupakan gabungan doktrin atas hak kesetaraan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997). Feminisme muncul dilatarbelakangi oleh ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam tatanan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan kesadaran dan upaya untuk menghilangkan tidak imbangnya relasi tersebut.

Dalam praktek keseharian feminisme sering disalah artikan sebagai tuntutan emansipasi kaum perempuan padahal istilah tersebut mengacu pada gerakan sosial yang dilakukan baik perempuan maupun laki-laki untuk meningkatkan kedudukan serta peran kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-hak yang dimiliki keduanya secara adil. Feminisme merupakan sebuah gerakan perempuan yang menuntut kesamaan dan keadilan hak dengan laki-laki.

Pendapat lain muncul dari Najmah Sa'idah, Arief Iskandar dan Husnul Khatimah (Revisi Politik Perempuan, 2003) menyatakan feminisme merupakan suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi bagi perempuan di lingkungan keluarga, tempat kerja maupun dalam masyarakat serta adanya tindakan sadar akan laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut. Feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Pengertian tentang feminisme dapat berubah seiring waktu karena pandangan atau pemahaman feminis yang berdasarkan realita secara historis dan budaya serta tingkat kesadaran persepsi dan perilaku. Bahkan dengan jenis perempuan yang hampir mirip terdapat perbedaan pendapat dan terjadi perdebatan mengenai pikiran feminis. Sebagian dilandaskan dengan alasan misalnya akar kebudayaan patriarki dan dominasi laki-laki dan sampai resolusi final atas perjuangan perempuan akan non-eksploitasi, gender, lingkungan, kebebasan kelas, latar belakang serta ras.

Mary Wollstonecraft (Tuner 2012) perintis gerakan feminisme Inggris dalam karyanya yang berjudul *A Vindication of the Rights of Woman* (Perlindungan hak-hak kaum perempuan) mengemukakan bahwa kaum wanita terkhusus dari kalangan menengah merupakan kelas tertindas yang harus

bangkit dari belenggu rumah tangga. dalam masyarakat patriarkhi, perempuan dimasukkan pada kubu rumah yang terbatas sedangkan laki-laki menguasai kubu umum yakni lingkungan dan kehidupan diluar rumah. Perempuan menjadi tidak merdeka dalam menentukan hak, kewajiban dan tanggungjawabnya sendiri. Situasi ketidakadilan tersebut muncul dari struktur budaya yang dibuat oleh manusia, Michael Foucault (2007).

2. Penguatan Kapasitas

Dalam kehidupan sehari-hari penguatan kapasitas dapat dilakukan dengan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Brow (2001) mengatakan penguatan kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Menurut Grindle (1997) kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan salah satunya dalam dimensi pembangunan sumber daya manusia (SDM), dengan fokus personil yang profesional dan berkemampuan teknis, serta tipe kegiatan seperti training, praktek langsung, kondisi iklim kerja dan rekrutmen. Penguatan kapasitas merupakan suatu proses untuk melakukan sesuatu atau serangkaian gerakan. Perubahan tingkatan level di dalam individu, organisasi-organisasi, kelompok-kelompok atau sistem-sistem dalam rangkaian untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi. Sehingga dapat tanggap dalam perubahan lingkungan yang ada, Morison (2001).

Tujuan dari penguatan kapasitas tentunya agar individu, organisasi maupun juga sistem dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa aspek manusia (*human capacity*) menjadi pemahaman tentang kapasitas.

Memang dapat dipahami bahwa kapasitas maupun kemampuan dapat dinilai dari manusia.

3. Kesadaran Berpolitik

Kesadaran berpolitik merupakan gabungan dua kata yang berbeda jika dilihat dari segi makna. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan dapat merasa suatu persoalan peristiwa. Sementara politik berarti usaha untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Jadi, kesadaran berpolitik bila disatukan memiliki arti keadaan tahu, mengerti dan merasa tentang cara-cara atau usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Subakti (2010) mendefinisikan kesadaran berpolitik sebagai kesadaran setiap orang terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini tentunya berkaitan dengan pengetahuan seseorang tentang politik dan lingkungan serta berkaitan juga dengan minat dan perhatian seseorang terhadap masyarakat dan politik di lingkungan tempat dia hidup. Pendapat lain dari Milbiath (Fatwa, 2016) menyatakan bahwa kesadaran berpolitik adalah kesadaran warga negara baik individu maupun kelompok agar turut serta mengikuti kegiatan politik. Kegiatan politik dapat berupa kampanye politik, ikut memilih dalam pemilihan umum, melakukan kontak dengan politik serta hal lainnya. Namun, kesadaran agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik tidak dapat tumbuh dengan sendirinya karena tentu kesadaran harus dibangun melalui pengetahuan. Seorang individu dikatakan sadar apabila orang tersebut mengetahui perbuatan yang sedang ia lakukan. Ruslan (Winarti, 2017) kesadaran politik merupakan berbagai bentuk pengetahuan, nilai-nilai dan orientasi yang membentuk

wawasan politik seseorang ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik.

4. Teori Penunjang

a. Relasi Kuasa (*Power Relation*)

Power Relation atau relasi kuasa merupakan hubungan antara aktor-aktor dengan tingkat kekuasaan berbeda yang mempunyai kepentingan masing-masing. Michael Foucault menyatakan konsep kekuasaan merupakan suatu dimensi dan relasi, dimana ada relasi disana ada kekuasaan. Setiap proses politik biasanya didasari isu relasi kuasa dalam tingkat individu maupun kelompok. Di dalam relasi kuasa terdapat unsur kekuatan hubungan sosial yaitu seorang aktor memiliki kelebihan untuk merubah perilaku aktor yang lain. Secara sederhana unsur kekuasaan memiliki pengaruh dalam membentuk sebuah program atau kegiatan sesuai dengan kepentingan seseorang bahkan terhadap perlawanan aktor-aktor lain. Kekuasaan bukanlah milik tetapi strategi. Kekuasaan bekerja melalui strategi yang berlangsung dimanapun, kekuasaan semakin terealisasi melalui adanya perbedaan.

b. Orang Kuat Lokal (*Local Strongman*)

Local Strongmen atau orang kuat lokal merupakan tokoh-tokoh yang identik dengan keahlian atau kelebihan dalam mempengaruhi pemikiran dan tindakan orang lain yang mereka miliki secara alami. Orang kuat lokal sangat identik dengan elit. Banyak pengertian tentang konsep elit namun elit dan orang kuat lokal pada dasarnya sama-sama merujuk pada individu-individu yang memiliki kuasa, mereka berbeda

dengan massa, menguasai jaringan kekuasaan yang berada dilingkungan kekuasaan maupun yang sedang berkuasa. Keunggulan elit atas massa tergantung pada berhasil tidaknya dalam memanipulasi lingkungan dengan simbol-simbol, kebaikan dan tindakan-tindakan. (Mas'ood & Mac Andrew, 2006). Sedangkan Rozaki (2004) menyatakan kuasa atau kekuasaan tidak hanya dilihat dari jabatan maupun kedudukan yang dimiliki seseorang/kelompok dalam suatu masyarakat, tetapi kekuasaan adalah wujud superioritas seseorang dalam menguasai orang lain. Teori lain muncul dari Joel S. Migdal yang mendefinisikan orang kuat lokal sebagai kekuatan informal, baik sebagai tuang tanah, pengusaha, kepala suku, panglima perang, tengkulak, bos, petani kaya, pemimpin sebuah klan dan sebagainya, yang berusaha memonopoli kontrol atas masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu lewat kerjasama jejeringan yang telah mereka bangun.

c. Pemerintah Bayangan (*Shadow State*)

Shadow State atau pemerintah bayangan biasanya akan hadir, tumbuh dan berkembang ketika fungsi pada institusi pemerintah formal tidak berjalan dengan semestinya. Penyebabnya adalah karena elit-elit penyelenggara pemerintah formal mengalami ketidakberdayaan dalam menghadapi kekuatan ekonomi, sosial dan politik yang dominan berada diluar struktur pemerintahan formal, Willian Reno (1995). Konsekuensi dari itu ialah adanya praktik shadow state yakni penyelenggaraan pemerintah akan lebih banyak dikendalikan oleh otoritas diluar struktur pemerintah daripada otoritas formal dalam struktur pemerintahan. Dalam proses pemilihan setiap kandidat tentunya memerlukan biaya

atau modal politik yang sangat tinggi serta memerlukan dukungan politik yang disebut dengan modal politik. Dua modal ini yang kemudian akan sangat menentukan kemenangan dari bakal calon yang turut serta dalam pemilihan. Modal ekonomi yang dibutuhkan biasanya tidak selalu dari kantong para calon kadidat sendiri namun mereka juga mendapat modal dari para donatur politik.

d. Politik Uang (*Money Politic*)

Money politic atau politik uang merupakan suatu fenomena yang sangat lumrah terjadi bahkan telah menjadi budaya pada saat kampanye yakni dengan cara kandidat (bakal calon) memberikan uang atau barang kepada pemilih yakni masyarakat, dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat ketika hendak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Hal ini tentunya tidak luput dari pemilu tingkat desa yakni Pilkades. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa layaknya desa otonom, yang dimana pemilihan pimpinan dilakukan secara demokrasi lewat proses elektoral. Dalam lingkup tekecil proses pilkades tidak lepas dari praktik politik uang. Menurut Ismawan (1999) dari tingkat pemilihan kepala desa hingga pemilihan kepala daerah atau bahkan pemilihan presiden hampir pada saat pemilihan menggunakan uang. Uang dan strategi yang digunakan berjalan beriringan agar sesuai dengan tujuan. Pola seperti ini kemudian menghasilkan 2 hal yakni klientelisme dan patronase. Klientelisme sederhananya berarti penukaran yang sifatnya individual bercirikan interaksi kekuasaan dan kewajiban yang dialami tidak memiliki keseimbangan diantara keduanya. Dan patronase yakni mempersiapkan klien untuk mengakses

berbagai fasilitas. Hal inilah yang kemudian membentuk pola interaksi timbal balik saling tukar menukar sehingga membawa keuntungan satu sama lain (Aspinall & Sukmajati, 2015). Hal seperti ini tentunya diatur dalam UU No. 1 pasal 73 ayat (1) tahun 2015 menyatakan bahwa calon dan/ atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Namun yang terjadi adalah justru sering dianggap sebagai sesuatu hal yang lumrah dan praktik politik yang telah lazim dilakukan di lingkungan masyarakat. Praktik ini yang kemudian menjadikan setiap proses elektoral menjadi mahal.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif fenomenologi. Penelitian kualitatif fenomenologi yaitu jenis pendekatan yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalamannya. Penelitian fenomenologi bertujuan yakni guna menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk pengalaman interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Penelitian fenomenologi lebih mengutamakan pada mencari, mempelajari dan menyampaikan arti fenomena, peristiwa yang terjadi dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Penelitian kualitatif termasuk dalam penelitian kualitatif murni karena pelaksanaannya didasarkan pada usaha memahami serta menggambarkan ciri-ciri intrinsik dari fenomena-fenomena yang terjadi pada diri sendiri (Eko

Sugianto, 2015). Penelitian ini menggambarkan secara jelas tentang objek penelitian melalui fenomena yang dialami para informan terkait. Penerapan metode kualitatif ini data yang diperoleh akan lebih lengkap, mendalam kredibel, informasinya luas dan lebih bermakna.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Doka Kaka, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Unit Analisis

Unit analisis adalah objek atau unit yang akan diteliti, penelitian ini di fokuskan pada penguatan kapasitas perempuan atas kesadaran berpolitik di Desa Doka Kaka, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini informan terdiri dari calon kades perempuan yang mencalonkan diri dalam Pilkades tahun 2021 di Desa Doka Kaka, Kepala Desa Doka Kaka yang saat itu terlibat dalam calon kades pada Pilkades tahun 2021, tokoh masyarakat, anggota organisasi PKK setempat dan pemuda-pemudi. Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian adalah orang-orang yang dilihat mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti terkait dengan hal yang akan diteliti. Pada penelitian ini individu yang menjadi subjek adalah merata dari masyarakat (perempuan dan laki-laki) di Desa Doka Kaka. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *snowball*, sehingga peneliti hanya

menentukan satu tokoh kunci dan akan bergulir pada informan-informan yang diperlukan sampai tercukupinya data.

Tabel 1.1 Deskripsi Informan

No.	Nama	Umur (tahun)	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1.	Yosef Lede A.Md	49 Tahun	Laki-laki	S-1	Kepala Desa
2.	Paulina Rade Kaka	44 Tahun	Perempuan	S-1	Calon Kades Perempuan pada Pilkades 2021
3.	Frederika Ndun	47 Tahun	Perempuan	S-1	PKK Desa Doka kaka
4.	David Mikael	48 Tahun	Laki-laki	S-1	<i>Stakeholder</i>
5.	Katrina Olviana	35 Tahun	Perempuan	S-1	PKK
6.	Hendrik T. Bolo	70 Tahun	Laki-laki	SMA	Masyarakat
7.	Apliana Sida	60 Tahun	Perempuan	SMP	Masyarakat
8.	Sendriken V.R. Mude	23 Tahun	Perempuan	SMA	Pemuda/i

Sumber : Data Primer 2023

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pendidikan politik bagi kaum perempuan dalam penguatan kapasitas atas kesadaran berpolitik bagi kaum perempuan di Desa Doka Kaka, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan cara teknik *snowball*, yakni suatu teknik pemilihan informan dengan menentukan satu tokoh kunci lalu kemudian bergulir bagaikan bola salju sampai data dirasa cukup. Tokoh kunci disini adalah tokoh di masyarakat yakni calon perempuan dan calon laki-laki (sekarang menjabat sebagai kepala desa) pada pilkades 2021 dan kaum perempuan. Kedua tokoh ini yang selanjutnya akan mengarahkan kepada tokoh-tokoh selanjutnya yang akan diwawancarai. Jumlah informanpun tidak dibatasi karena disesuaikan dengan data yang dibutuhkan. Kalau Sudah tercukupinya data maka jumlah informan tidak perlu ditambah (Moleong, 2007).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan pada gejala dari subjek yang akan diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan maupun situasi nyata dilapangan, observasi dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian (Surachmad, 2006).

Observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan partisipasi pasif yakni peneliti hanya mengamati tetapi tidak terlibat dalam kegiatan. Observasi ini termasuk dalam teknik pengumpulan data secara sekunder (bukan utama). Observasi dilakukan dengan melihat informan dalam memberikan jawaban saat wawancara berlangsung. Adapun hal-hal yang di observasi adalah :

- Kesadaran perempuan melalui pendidikan politik

- Pemilihan kepala desa tahun 2021 di Desa Doka Kaka
- Faktor-faktor yang menjadi penghambat perempuan dalam politik

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara atau orang yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau orang yang memberi jawaban atas pertanyaan, yang dilakukan dengan maksud tertentu. Singkatnya, wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan baik secara lisan maupun tertulis mengenai masalah yang sedang dibahas (Surachmad, 2006).

Wawancara merupakan alat untuk membuktikan keterangan dari informasi yang diperoleh sebelumnya. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan informan guna mengetahui penguatan kapasitas perempuan atas kesadaran berpolitik di Desa Doka Kaka, Kabupaten Sumba Barat, NTT. Adapun hal-hal yang peneliti wawancara adalah :

- Seberapa penting perempuan dalam politik
- Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam ranah politik
- Organisasi PKK dalam meningkatkan kualitas perempuan
- Masyarakat melihat situasi kondisi politik di desa yang pro terhadap perempuan
- Kaum muda dalam menyikapi politik saat ini

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen-dokumen atau catatan yang ada di daerah penelitian (Moeleong, 2007). Ada dua bentuk dokumentasi, yakni *document* dan *record*. *Document* adalah setiap bahan tertulis atau film sedangkan *record* adalah setiap pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan penelitian. Karena sumber datanya stabil maka keduanya banyak digunakan dan dapat digunakan sebagai bukti yang kuat. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa RPJMDes Desa Doka Kaka tahun 2021-2027 sebagai bahan acuan untuk informasi yang diperoleh peneliti. Selain itu ada data sekunder berupa publikasi dan informasi di internet terkait pemilihan kepala desa tahun 2021 di Desa Doka Kaka dan informasi lainnya yang berkaitan.

d. Triangulasi Data

Untuk mengukur keabsahan data, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data yakni memanfaatkan sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis, data yang digunakan harus memenuhi dua alat bukti yang sah. Hasil dari wawancara yang satu harus didukung oleh hasil dari wawancara yang lain atau dokumentasi dan sebagainya.

6. Jenis Dan Sumber Data

Ada dua jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan dilapangan. Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah narasumber yang telah diwawancara sebagai informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pelengkap dari data primer, karena diperoleh dari sumber data yang kedua. Biasanya data sekunder ini sangat membantu peneliti bila data primer sulit dan terbatas untuk diperoleh. Data sekunder dalam penelitian ini yakni data dalam bentuk yang telah jadi melalui publikasi dan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengaturan data, pengorganisasian kedalam satu pola bertujuan untuk menyampaikan atau membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur dan tersusun. Data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian dianalisis secara kualitatif, Moeloeng (2007). Dalam penelitian kualitatif data yang berupa kata-kata akan dianalisis melalui tiga alur, yakni :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Sejak perumusan kerangka konseptual, permasalahan penelitian hingga teknik pengumpulan data maka reduksi data telah dilakukan, hingga pada penelitian lapangan selesai bahkan sampai laporan tersusun. Maka reduksi data dapat diartikan sebagai usaha analisis untuk menajamkan penggolongan, mengarahkan serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan demikian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kesimpulan dari informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi tersebut dapat berupa teks, gambar, bagan atau tabel yang menjelaskan fenomena yang diteliti untuk dijadikan deskripsi dan argumentasi agar mudah dipadukan.

3. Penarikan Kesimpulan

Bagian akhir dari penelitian yakni penarikan kesimpulan, peneliti mencari arti, konfigurasi yang kemudian diuji kebenarannya, pola-pola, kekokohan dan validitasnya. Kemudian interpretasi akan memberikan makna pada data dan mencari hubungan antara berbagai konsep, dalam hal ini lebih menggambarkan pandangan dari penulis. Data yang digunakan hanyalah data yang relevan dengan penelitian sehingga memperoleh tingkat validitas yang tinggi.

BAB II

PROFIL DESA DOKA KAKA, KECAMATAN LOLI, KABUPATEN SUMBA BARAT

A. Kondisi Desa

1. Sejarah Desa Doka Kaka

Desa Doka Kaka merupakan salah satu desa tertua dari 14 desa yang berada di bagian selatan Kecamatan Loli. Pada tahun 1940an Desa Doka Kaka masih bergabung dalam masa pemerintahan swapraja yang dipimpin oleh Raja Koki dengan beberapa daerah kekuasaan, sementara yang menjadi raja kecil saat itu adalah Raja Giku dengan wilayah kekuasaan yaitu Tanarighu, Tanarara dan Doka Kaka. Peralihan status swapraja ke desa terjadi pada masa kepemimpinan Raja Giku. Pada umumnya masyarakat Desa Doka Kaka berasal / turun dari beberapa kampung yang berada di Kecamatan Loli seperti Kampung Tambera, Ratewana, Watu Bolo dan Praigege. Selain penduduk asli desa, ada juga penduduk yang berasal dari luar seperti etnis Jawa, Flores, NTB (Bima) dan lain-lain.

Seperti Desa lainnya Desa Doka Kaka telah banyak melakukan pergantian pemimpin wilayahnya (kepala desa). Secara singkat diuraikan sebagai berikut :

- R.R Soba : (Tahun 1960 – Tahun 1965)
- G. G Bili : (Tahun 1965 – Tahun 1970)
- Y.L. W Rato : (Tahun 1970 – Tahun 1980)
- Y.Ng. Dimu : (Tahun 1980 – Tahun 2003)
- Y. T. Dedo : (Tahun 2004 – Tahun 2008)
- D. S. Gole : (Tahun 2008 – Tahun 2015)

- Yosef Lede A.Md : (Tahun 2016 – Tahun 2021)
- Yosef Lede A.Md : (Tahun 2021- Sekarang)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sejak berdirinya Desa Doka Kaka belum ada satu pun perempuan yang menjabat sebagai kepala desa. Dan dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, peneliti menemukan fakta bahwa sejauh dilaksanakan pilkades, untuk pertama kalinya pada pilkades yang diselenggarakan tahun 2021 ada salah satu calon kandidat perempuan yang ikut terlibat mencalonkan dirinya, namun belum berkesempatan untuk menduduki jabatan sebagai kepala desa. Namun, dengan sudah berani tampil merupakan suatu perkembangan cukup baik untuk kaum perempuan di Desa Doka Kaka.

2. Keadaan Geografis Desa Doka Kaka

Secara administrasi Desa Doka Kaka berada di wilayah Kecamatan Loli dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tema Tana
- b. Selatan berbatasan dengan Desa Ubu Raya dan Puu Mawo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bali Ledo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ubu Raya

Tabel 2.1 Luas wilayah menurut penggunaannya

Luas pemukiman	2,5ha/m ²
Luas perkebunan	3 ha/m ²
Luas tanah kering	7,5 ha/m ²
Luas tanah fasilitas umum	3 ha/m ²
Total Luas	16 ha/m²

Sumber : RPJMDes Desa Doka Kaka 2021-2027

3. Kondisi Demografis Desa Doka Kaka

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1014 orang
Perempuan	1025 orang
Total Jumlah Penduduk	2039 orang

Sumber : RPJMDes Desa Doka Kaka 2021-2027

Dari data yang diperoleh, jumlah penduduk Desa Doka Kaka sebesar 2039 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan sebesar 1025 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1014 jiwa. Jumlah kepala keluarga sebanyak 485 KK pada tahun 2023. Pada umumnya kehidupan masyarakat Desa Doka Kaka bermukim di daerah pesisir jalan dan sebagian lainnya berkumpul di perkampungan dimana dalam satu kampung rata-rata dihuni 2-3 KK dan dalam setiap rumah tangga memiliki anggota keluarga 5-7 jiwa.

4. Keadaan Ekonomi

Tabel 2.3 Mata Pencaharian Pokok Penduduk

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Buruh Tani	541 Orang
Ibu Rumah Tangga	210 Orang
Pensiunan	15 Orang
Pegawai Negeri Sipil	45 Orang
TNI	1 Orang

Polri	4 Orang
Perdagangan	35 Orang
Karyawan Honorer	22 Orang
Tukang Cukur	2 Orang
Tukang Batu	Orang
Tukang Kayu	30 Orang
Tukang Jahit	4 Orang
Pendeta	Orang
Pastor	Orang
Anggota DPRD	1 Orang
Guru	45 Orang
Konsultan	Orang
Dokter	Orang
Bidan	1 Orang
Perawat	12 Orang
Supir	60 Orang
Pedagang	35 Orang
Belum/Tidak Bekerja	85 Orang
Lainnya	Orang
Jumlah Total Penduduk Yang Bekerja	1.063 Orang

Sumber : RPJMDes Desa Doka Kaka 2021-2027

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani ladang dan sawah dan sebagian kecil sebagai PNS, tenaga kontrak, dan honorer. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan mayoritas

masyarakat Desa Doka Kaka menjadi petani. Tanah yang subur dan pengetahuan bercocok tanam yang baik menjadikan bertani sebagai mata pencaharian utama masyarakat. Selanjutnya disusul oleh Ibu Rumah Tangga dengan jumlah 210 orang. Jumlah ibu rumah tangga yang cukup tinggi di Desa Doka Kaka dapat diberdayakan melalui organisasi PKK sehingga para ibu-ibu tersebut mendapatkan pengetahuan lebih dan keterampilan lain yang dapat dikembangkan disamping menjadi ibu rumah tangga.

5. Aspek Pendidikan

Dari jumlah penduduk Desa Doka Kaka, yang mengenyam pendidikan tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Tidak/belum sekolah	102 orang	83 orang
Tidak tamat SD/Sederajat	187 orang	144 orang
Tamat SD/Sederajat	336 orang	429 orang
SLTP/Sederajat	287 orang	293 orang
SLTA/Sederajat	86 orang	63 orang
Diploma 1 – Diploma 3	2 orang	1 orang
Diploma III/Sarjana Muda/Akademi	1 orang	1 orang
Dipoma IV/S1	13 orang	11 orang
Total	1014 Org	1025 Org

Sumber : RPJMDes Desa Doka Kaka 2021-2027

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Jika dilihat dari data tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan cukup berbeda. Dapat dilihat total jumlah perempuan yang mengeyam pendidikan dari SD - Sarjana lebih rendah dari pada laki-laki. Kebanyakan perempuan berhenti bersekolah setelah lulus SD dan tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi SMP, SMA dan selanjutnya diploma atau sarjana. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Doka Kaka masih kurang peduli terhadap betapa pentingnya pendidikan serta kurangnya motivasi untuk belajar. Khusus perempuan biasanya menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkat SMA saja. Hal ini karena adanya pemikiran orang tua yang menganggap bahwasannya yang membutuhkan sekolah tinggi atau berpendidikan tinggi adalah kaum laki-laki. Angka putus sekolah yang tinggi ini diperlukan peran pemerintah dalam mendorong dan memotivasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya serta membenarkan stereotip yang ada dimasyarakat bahwa perempuan juga membutuhkan sekolah tinggi untuk mendapatkan masa depan yang baik. Karena zaman sekarang mendapatkan pekerjaan dengan ijazah SD atau SMP bahkan SMA cukup susah. Dengan adanya kesempatan belajar diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat untuk mau mencari ilmu dan memperoleh pendidikan yang layak.

6. Kondisi Sosial Budaya

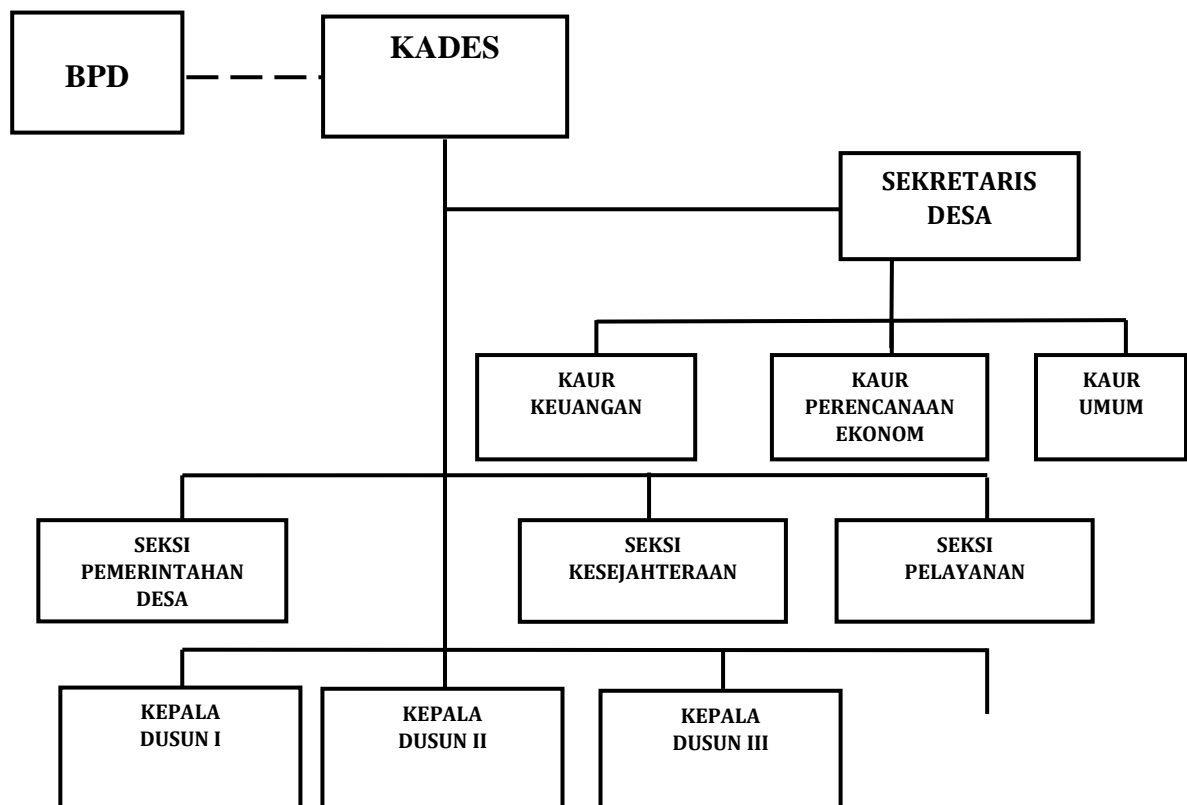
Kondisi sosial budaya di Sumba tidak dapat dilepas dari berbagai budaya yang sudah ada dari zaman dulu dan sampai saat ini masih dilestarikan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Salah satu budaya yang saat ini menjadi banyak perbincangan di masyarakat Sumba yakni budaya

'kawin tangkap'. 'Kawin tangkap' dapat diartikan sebagai suatu sistem perkawinan yang terjadi tanpa persetujuan salah satu belah pihak. Prosesi ini merupakan jenis perkawinan yang terjadi bukan atas dasar cinta, melainkan kesepakatan antara orang tua perempuan dan orang tua laki-laki tanpa sepengetahuan perempuan. Dahulunya orang-orang menganggap ini budaya yang memang ada adat dan ritualnya sendiri sehingga tidak dilakukan dengan sembarangan dan tanpa tujuan. Karena orang-orang atau nenek moyang zaman dulu beranggapan bahwa mereka memiliki kepercayaan sendiri mengapa hal ini terjadi. Seiring berjalannya waktu budaya itu sedikit demi sedikit mulai hilang karena disertai dengan kemajuan teknologi saat ini. Namun, beberapa tahun terakhir ini budaya tersebut mulai kembali muncul dan menjadi perbincangan karena dianggap sekelompok orang yang melakukan hal ini dianggap melaksanakan budaya yang tidak semestinya dilakukan, dengan kata lain dapat diartikan sebagai sekelompok orang ini mengartikan budaya 'kawin tangkap' ini dengan pengertian yang lain. Sehingga tidak heran banyak perempuan yang menjadi korban budaya yang salah ini, karena mereka tidak mampu melakukan perlawanan dan mempertahankan hak mereka ketika sudah dikaitkan dengan budaya.

B. Pemerintah Desa

Adapun struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Doka Kaka dapat dilihat melalui bagan struktur pemerintah desa sebagai berikut :

Bagan 2.1 Struktur Pemerintah Desa Doka Kaka



(Sumber : RPJMDes Desa Doka Kaka 2021-2027)

Dari bagan struktur Pemerintah Desa Doka Kaka diatas dapat diuraikan nama-nama dalam struktur kelembagaan pemerintah desa sebagai berikut :

Tabel 2.5 Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1.	Yosef Lede A,Md	Kepala Desa	Laki-laki
2.	Paulus S. W. Rato	Sekretaris Desa	Laki-laki
3.	Resensi D. A. Lalo	Kaur Keuangan	Perempuan
4.	Samuel B. Rere	Kaur Perencanaan	Laki-laki
5.	Imelda R. Rato	Kaur Tata Usaha dan Umum	Perempuan
6.	Ciprianus Lede	Kasie Pemerintahan	Laki-laki
7.	Lidia Bolo	Kasie Kesra	Perempuan
8.	Soleman Bili	Kasid Pelayanan	Laki-laki
9.	Selvinus S. Buni	Kepala Dusun I	Laki-laki
10.	Anderias Wulang	Kepala Dusun II	Laki-laki
11.	Lorens Wole	Kepala Dusun III	Laki-laki
12.	Sisilia Mere Mata	Tenaga Administrasi	Perempuan
13.	Novriana Ana Lalo	Tenaga Administrasi	Perempuan
14.	Desi Ratna	Tenaga Administrasi	Perempuan
15.	Angga Pratama W. Rato	Tenaga Administrasi	Laki-laki
16.	Donatus Modu	Ketua BPD	Laki-laki
17.	Genoveva K. Dewi	Ketua PKK	Perempuan
18.	Lado P. Seingu	Ketua LPM	Laki-laki

Sumber : RPJMDes Desa Doka Kaka 2021-2027

Dari tabel struktur kelembagaan pemerintah desa, maka akan dipaparkan penjelasan tentang kelembagaan yang ada di Desa Doka Kaka sebagai berikut :

Kelembagaan Desa

- **Pemerintah Desa** : Peran dan manfaat dari pemerintah desa sangat besar. Hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat dan aparat desa dalam setiap kegiatan di desa, termasuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai pemerintah desa. Hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat sangat dekat karena dalam setiap kegiatan masyarakat desa baik acara adat maupun kegiatan sosial, pemerintah selalu terlibat atau hadir. Dari rincian nama-nama struktur kelembagaan dapat dilihat ada perempuan yang ditempatkan pada posisi penting jabatan dalam pemerintah desa seperti bendahara, kasie dan kaur. Selain itu, terdapat 3 orang pegawai perempuan yang ikut bekerja membantu pada bagian administrasi di kantor desa. Dapat dilihat bahwa perempuan juga mengambil peran dalam pemerintah desa.
- **BPD** : Peran dan manfaat dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) belum begitu besar karena belum maksimal menjalankan fungsi pengawasannya terhadap setiap proses musyawarah dan proses pembangunan di desa. Hubungan antara BPD dan masyarakat juga sangat dekat dapat dilihat dari keterlibatan BPD dalam setiap kegiatan seperti kedukaan, dan lain-lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110/2016 tentang BPD telah mengamanatkan kewajiban adanya unsur perempuan dalam struktur BPD. Setidaknya satu orang anggota perempuan harus ditempatkan dalam struktur keanggotaan berjumlah minimal lima orang dan maksimal Sembilan orang. Di Desa Doka Kaka, memiliki 3 dusun, dusun 1 dan dusun 2 memiliki masing-masing 1 anggota perempuan.

- **LPM** : Peran dan manfaat LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) kurang begitu terasa di desa. Hal ini dipengaruhi karena lembaga tersebut belum menyadari tugas dan tanggungjawabnya sebagai lembaga perencana untuk desa. Hubungan dengan masyarakat dekat karena selalu terlibat dalam setiap kegiatan masyarakat. LPM juga terdapat perempuan sebagai bendahara dalam Lembaga ini.
- **Gapoktan** : Peran dan manfaat gapoktan masih sangat kecil karena sejauh ini tidak dilakukan penyegaran fungsi atau pertemuan terkait kegiatan gapoktan sebagai induk dari sejumlah kelompok tani yang ada di desa. Hubungannya dengan masyarakat cukup dekat karena sebagian anggota gapoktan masih aktif dalam kegiatan gotong royong. Salah satu kelompok gapoktan yang ada di Desa Doka Kaka gapoktan “Lara Morika” memiliki beberapa anggota anggota perempuan didalamnya.
- **PKK** : Peran dan manfaat sangat besar. Karena melalui wadah ini para ibu-ibu rumah tangga telah mengikuti berbagai kegiatan atau pelatihan. Terutama yang berkaitan dengan peningkatan taraf ekonomi rumah tangga. Hubungan dengan masyarakat sangat dekat karena sering mengadakan kegiatan baik berkaitan dengan program kerja PKK maupun kegiatan lain yang bertujuan mmbangun kedekatan secara emosional misalnya kegiatan arisan ibu-ibu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Desa Doka Kaka, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai “Penguatan Kapasitas Perempuan Atas Kesadaran Berpolitik” dapat ditarik kesimpulan bahwa penguatan kapasitas perempuan oleh pemerintah belum dilakukan secara optimal dan kesadaran berpolitik perempuan di Desa Doka Kaka masih sangat kurang. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peran pemerintah Desa Doka Kaka dalam membantu meningkatkan kapasitas bagi perempuan hanya sekedar memberikan kesempatan masyarakat perempuan untuk ikut terlibat dalam berbagai kegiatan di kantor desa sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan diri. Namun, dalam berpolitik belum diberikan ruang untuk melakukan pembelajaran politik yang lebih mendalam. Pemerintah harusnya menjadi agen yang menyiapkan suatu wadah untuk meningkatkan pemahaman-pemahaman masyarakat tentang suatu hal yang masih keliru. Terkhususnya kaum perempuan dengan segala keterbatasan perlu bagi pemerintah untuk menyiapkan ruang bagi perempuan agar dapat memperluas pemahaman yakni memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan berpolitik serta memperoleh dukungan moral.
2. Kesadaran perempuan dalam berpolitik di Desa Doka Kaka sangat kurang. Beberapa kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah nyatanya belum berjalan secara optimal. Karena mereka sebenarnya sadar akan hak-hak mereka namun mereka tidak memiliki keberanian untuk ikut terlibat khususnya dalam ranah

politik. Faktor-faktor yang menjadi penghambat perempuan dalam mendobrak dominasi yakni adanya faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar menjadi penyebab perempuan terhambat dalam berpolitik. Faktor-faktor ini sangat mejojokkan situasi dan kondisi perempuan sehingga perempuan harus bisa keluar dari zona yang tidak menguntungkan tersebut apabila ingin memperjuangkan hak-hak perempuan. Mereka selalu menganggap bahwa pengetahuan berpolitik mereka sangat jauh tertinggal dibandingkan laki-laki. Budaya patriarki dan stereotip yang bias gender masih mendominasi di Desa Doka Kaka. Kurangnya pengetahuan politik menjadikan minat perempuan dalam berpolitik masih sangat kecil.

Dapat disimpulkan, bahwa perempuan dalam mendobrak dominasi melalui kesadaran perempuan dalam berpolitik dapat berjalan dengan optimal melalui pendidikan politik, akan tetapi di Desa Doka Kaka belum ada pendidikan politik formal yang mampu diakses oleh masyarakat. Pendidikan politik dapat membantu perempuan untuk mengatasi hambatan-hambatan dan diskriminasi gender dalam politik. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan politik dapat mengembangkan kesadaran berpolitik. Peningkatan kapasitas perempuan adalah hal yang penting dalam meningkatkan kesadaran berpolitik perempuan. Oleh karena itu, baik masyarakat maupun pemerintah harus memberikan dukungan dalam penguatan kapasitas perempuan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Diperlukan akses informasi yang lebih mudah dan terbuka serta menghapus stereotip gender dalam politik.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan mengenai ‘Perempuan mendobrak dominasi di Desa Doka Kaka, Kecamatan Loli, kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka peneliti memberikan beberapa saran, yakni :

1. Lingkungan keluarga dan sosial menjadi pengaruh dalam perkembangan pola pikir seseorang. Sehingga sebaiknya sejak dini tidak ada pemilihan wilayah antara perempuan dan laki-laki sehingga tidak adanya kesenjangan sosial terkait gender yang terjadi
2. Pendidikan politik formal perlu dilakukan di lingkungan terkecil yakni desa untuk meningkatkan kualitas kaum perempuan dalam mengakses berbagai informasi dan pembelajaran terkhususnya pembelajaran politik.
3. Kaum perempuan harus mampu mendobrak dominasi yang ada sehingga mampu menciptakan kesetaraan serta memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Menumbuhkan kesadaran dalam diri dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam memperjuangkan suara kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Moeleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Wollstonecraft, Mary. 2012. *A Vindication of the Rights of Woman*. Britania Raya

Lovesduski, Joni. 2008. *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta : Kanisius

Winarno, Surachmad. 2006. *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung : CV Tarsito

Sa'idah, Najmah, &dkk. 2003. *Revisi Politik Perempuan*. Bogor : Ide Pustaka Utama

JURNAL

Rahmatunnisa, Mudiyati. 2016. *Affirmative Action dan Penguatan Kapasitas Politik Kaum Perempuan Di Indonesia*. Jurnal Wacana Politik

Zaenal, Mukarom. 2008. *Perempuan dan Politik : Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif*. Jurnal Komunikasi

Sudharmono, 1995. *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka*. Jurnal Filsafat

Saputra, AH, &dkk.2020. *Analisis Wacana : Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018-2019*. Jurnal Perempuan

Wahyuni, F, Fernandes I. 2022. *Kesadaran Hukum pada Perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa di Indragiri Hilir*. Jurnal Selodang Mayang

Kiftiyah, A. 2019. *Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*. Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak

Soeharto, A. 2011. *Urgensi Pendidikan Politik bagi Perempuan*. Jurnal Pendidikan, Politik, Perempuan dan Demokrasi

Iriansyah, SH. 2017. *Tantangan dan Peluang Perempuan dalam Berpolitik di Indonesia*. Jurnal Ilmu Pendidikan

Yuwono, PN. 2018. *Perempuan dalam Kukungan Budaya Patriarki*. Jurnal Kajian Gender

Nurjanah, N, Ma'mun, S. 2018. *Analisis Pengaruh Faktor Pendidikan terhadap Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari*. Jurnal Ilmu Pendidikan

- Prastiwi, HJ, Haliim, W.2018. *Politisi Perempuan dan Korupsi : Mencari Solusi atas Dilema Politik Kesetaraan Gender di Era Reformasi*. Jurnal Politik kesetaraan gender
- Dalupe, B. 2020. *Kandidat Perempuan dan Tantangan Politik Patronase pada Pemilu Legislatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurna Inada
- Gusmansyah, W. 2019. *Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Jurnal Hawa : Pengarus Utamaan Gender

SUMBER LAIN/ INTERNET

RPJMDes Desa Doka Kaka Tahun 2021-2027

<https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>

<http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/dalam-pantauan-ditjen-bina-pemdes-pilkades-serentak-kabupaten-sumba-barat-dan-mamuju-berlangsung-aman>

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14716/1/T1_352012003_BAB%20I.pdf

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

KUHP Pasal 332 Ayat 2 Tentang Kawin Tangkap

UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1 Tentang Tinjauan Yuridis Hak Asasi Manusia

UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

DAFTAR PERTANYAAN

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KEPALA DESA DOKA KAKA, KECAMATAN LOLI

A. Identitas Informan

Nama : Yosef Lede A.Md

Jenis Kelamin : Laki-laki

B. Pertanyaan

1. Apakah bapak setuju, bahwasannya masalah perempuan dan isu kesetaraan gender tidak hanya berfokus pada rana/ lingkup perempuan saja tetapi juga menjadi hal yang harus dibahas dalam rana laki-laki juga?
2. Upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam membangun kesetaraan gender?
3. Apa benar ada tokoh perempuan yang terlibat dalam pencalonan kades tahun 2021 di desa ini?
4. Apa tanggapan bapak ketika ada tokoh perempuan yang ikut terlibat mencalonkan diri dalam Pilkades 2021?
5. Sejauh mana minat kaum perempuan mendalami politik di desa ini?
6. Apakah ada pendidikan politik formal di desa ini?
7. Bagaimana wujud peran pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas perempuan atas kesadaran berpolitik?
8. Apakah perempuan diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan di desa seperti Musdes, rapat-rapat atau kegiatan lainnya?

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK CALON KADES
PEREMPUAN PADA PILKADES TAHUN 2021 DI DESA DOKA KAKA**

A. Identitas Informan

Nama : Paulina Rade Kaka

Jenis Kelamin : Perempuan

B. Pertanyaan

1. Apakah benar ibu mencalonkan diri dalam pilkades tahun 2021 di Desa Doka Kaka? Mengapa ibu tertarik?
2. Apakah sebelumnya ibu mengikuti organisasi perempuan di desa ini? Bagaimana kapasitas perempuan diperkuat lewat organisasi tersebut?
3. Bagaimana perempuan menanggapi berbagai isu-isu yang dialami perempuan saat ini? Pandangan ibu sebagai seorang perempuan
4. Apakah pernah ada penyuluhan-penyuluhan tentang politik yang dilakukan?
5. Apakah perempuan diikutsertakan dalam musdes, rapat-rapat atau kegiatan di kantor desa?
6. Selain organisasi PKK, apakah ada akses lain yang ibu lakukan dalam mempelajari politik ? (Misal belajar otodidak, dll)
7. Seberapa penting perempuan dalam politik?
8. Apa saja faktor yang mungkin menghambat perempuan untuk berani tampil di ranah politik?
9. Apakah sebelumnya ada calon kades perempuan yang ikut terlibat dalam pencalonan kades di desa ini?
10. Apa yang ingin ibu kembangkan (tujuan yang ingin ibu capai) bila menjabat sebagai kades ?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PKK DESA DOKA KAKA

A. Identitas Informan

Nama : 1. Frederika Ndun
2. Katrina Olviana

Jenis Kelamin : Perempuan

B. Pertanyaan

1. Apa jabatan ibu di organisasi ini?
2. Apa saja kegiatan yang dilakukan ibu PKK di desa ini?
3. Apa ada pembelajaran politik dalam organisasi ini?
4. Bagaimana kapasitas perempuan diperkuat lewat organisasi PKK yang mewadahi kaum perempuan?
5. Apakah perempuan diikutsertakan dalam musdes, rapat-rapat atau kegiatan di kantor desa?
6. Bagaimana wujud usaha-usaha pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas perempuan dalam ranah politik agar diperkuat sehingga mampu berdiri sendiri dan membawahi hak-hak perempuan?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT DAN *STAKEHOLDE*)

A. Identitas Informan

Nama :

1. David Mikael (L)
2. Hendrik T. Bolo (L)
3. Apliana sida (P)

Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan

B. Pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu ketika ada calon kades perempuan yang mencalonkan diri dalam Pilkada tahun 2021?
2. Bagaimana kondisi sosial perempuan di desa ini?
3. Apakah sebelumnya pernah ada calon kades perempuan di desa ini?
4. Apa saja strategi-strategi yang digunakan calon-calon dalam pemilihan?
5. Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan dikantor desa?
6. Apakah pendidikan politik itu perlu bagi kaum perempuan?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMUDI

A. Identitas Informan

Nama : Sendriken V. R Mude

Jenis Kelamin : Perempuan

B. Pertanyaan

1. Apakah sebagai anak muda, anda tertarik untuk menyuarakan hak-hak perempuan?
2. Apakah anak muda terkhususnya kaum perempuan memperoleh ketidakadilan gender dalam keluarga dan budaya masyarakat?
3. Alasan politik itu menarik?
4. Bagaimana situasi kondisi anak muda sekarang ini dalam menanggapi politik?
5. Apakah Pendidikan politik itu penting untuk kaum muda?

LAMPIRAN

DOKUMENTASI FOTO BERSAMA INFORMAN



(Foto rapat dengan masyarakat di kantor desa)



(Foto bersama kepala desa)



(Foto bersama calon kades perempuan pada pilkades 2021)



(Foto bersama Ibu PKK)



(Foto bersama Ibu PKK)



(Foto bersama masyarakat/kaum perempuan)



(Foto bersama masyarakat)



(Foto bersama masyarakat)